

Kondisi perekonomian Kota Probolinggo Tahun 2016 berikut karakteristiknya serta proyeksi perekonomian tahun 2017-2018 dapat digambarkan melalui rancangan Kerangka Ekonomi Daerah yang juga merupakan penjelasan atas analisis statistik perekonomian daerah. Bab ini juga membahas kinerja perekonomian daerah Kota Probolinggo berikut dinamika faktor eksternal dan internalnya. Berdasarkan gambaran kerangka ekonomi daerah tersebut, maka disusun berbagai prioritas pembangunan, pengambilan kebijakan untuk menghadapi tantangan dan penyelesaian masalah pembangunan agar arah pembangunan daerah Tahun 2018 dapat dicapai sesuai dengan sasaran program dan kegiatan yang ditetapkan. Pada sisi yang lain, perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial merupakan dasar kebijakan anggaran untuk mengalokasikan perencanaan anggaran berbasis kinerja secara efektif dan efisien.

3.1. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

Pembangunan suatu kota akan terpengaruh oleh kebijakan ekonomi makro yang ada di kota tersebut serta bagaimana kebijakan ekonomi makro yang ada di tingkat Provinsi dan Nasional. Sinergitas kebijakan makro ekonomi kota dengan kebijakan ekonomi provinsi dan pusat merupakan hal yang harus dilaksanakan. Arah kebijakan ekonomi secara jangka menengah dapat terlihat pada RPJMD yang dijabarkan pada dokumen perencanaan tahunan (RKPD).

Kerangka ekonomi daerah yang akan dibangun sesuai dengan Misi RPJMD 2014–2019 yaitu **"Membangun Perekonomian Kota Probolinggo Yang Kompetitif, Kokoh dan Berkeadilan"**, dimaknai sebagai misi yang mengemban upaya untuk menciptakan sosok perekonomian Kota Probolinggo tahun 2019 yang kokoh dan berkeadilan, yakni sosok perekonomian kota yang kompetitif dengan memanfaatkan keunggulan komparatifnya, kokoh dan kuat dalam menghadapi berbagai turbulansi perekonomian namun tetap berorientasi pada perekonomian yang berkeadilan. Misi ini diarahkan untuk meningkatkan produktivitas rakyat agar mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan merata, mengurangi tingkat kemiskinan, mengurangi ketimpangan pendapatan dan tingkat pengangguran, serta membangkitkan daya saing agar makin kompetitif.

Upaya untuk mewujudkan misi tersebut berangkat dari keadaan perekonomian Kota Probolinggo pada saat ini dan proyeksinya di beberapa tahun mendatang yang dapat dilihat dari beberapa indikator ekonomi. Kebijakan dan kondisi ekonomi makro dapat terlihat antara lain melalui indikator Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan kontribusi sektoralnya,

pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, jumlah penduduk miskin, nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) serta tingkat pengangguran terbuka.

3.1.1.Kondisi Ekonomi Daerah Periode 2016

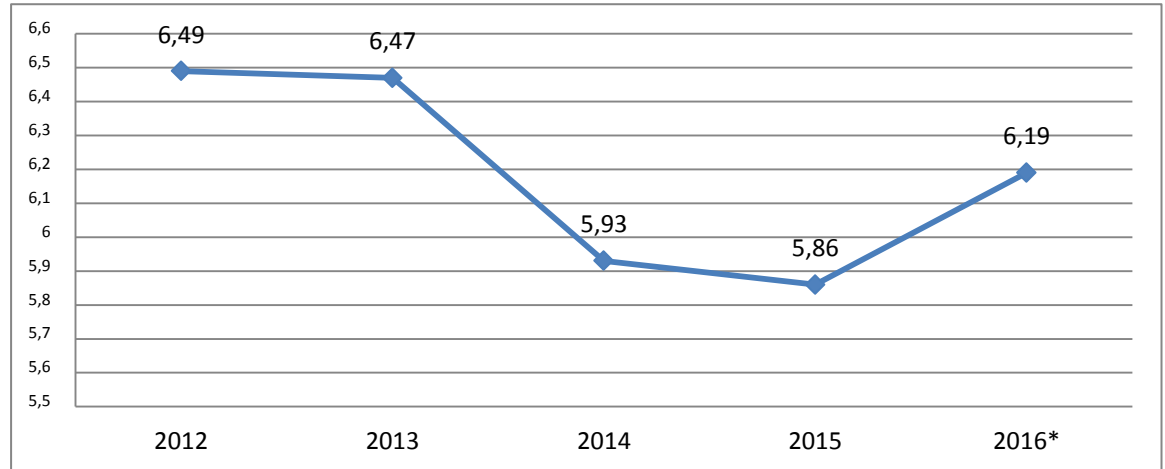
Perkembangan kondisi ekonomi daerah dapat dilihat dari indikator ekonomi makro serta perekonomian daerah. Perekonomian suatu daerah tidak dapat terlepas dari perekonomian regional, perekonomian nasional bahkan perekonomian global. Terdapat berbagai faktor perekonomian yang tidak dapat dikendalikan oleh daerah seperti menyangkut kebijakan pemerintah pusat di sektor moneter maupun sektor riil. Disamping itu perekonomian daerah juga dipengaruhi perekonomian global seperti naik turunnya harga minyak dunia, dan nilai tukar mata uang asing, serta pengaruh krisis keuangan global yang telah berdampak pada meningkatnya pemutusan hubungan kerja dan kelesuan pasar ekspor. Capaian indikator ekonomi daerah adalah sebagai berikut :

A. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Keberhasilan pembangunan ekonomi suatu daerah dapat dicerminkan dari beberapa indikator makro ekonomi, salah satunya yang paling sering digunakan adalah pertumbuhan ekonomi dengan tolak ukur pertumbuhan PDRB. Besarnya nilai PDRB yang berhasil dicapai dan perkembangannya merupakan refleksi dari kemampuan daerah dalam mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusia. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua sektor kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menggambarkan kemampuan daerah tersebut dalam mengelola dan menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk menghasilkan barang dan jasa. Besarannya tergantung pada hasil penggunaan potensi faktor-faktor produksi seperti sumber daya alam, sumberdaya manusia, modal dan teknologi serta semangat berwirausaha masyarakatnya dalam melakukan kegiatan ekonomi. Untuk publikasi ini PDRB menggunakan Tahun Dasar 2010.

Secara keseluruhan dalam kurun waktu lima tahun terakhir (tahun 2012-2016), pertumbuhan ekonomi di Kota Probolinggo menunjukkan trend penurunan. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Probolinggo pada tahun 2012 mengalami pertumbuhan sebesar 6,49%, selanjutnya tahun 2013 berkembang menjadi sebesar 6,47%, kemudian tahun 2014 perekonomian kondisi perekonomian sedikit melambat dengan tingkat pertumbuhan ekonomi sebesar 5,93% dan meningkat hingga mencapai 5,94% pada tahun 2015. Berdasarkan perhitungan estimasi sementara oleh BAPPEDA Kota Probolinggo pertumbuhan ekonomi Kota Probolinggo pada tahun 2016 tumbuh meningkat 0,25% dari tahun sebelumnya hingga mencapai 6,19%. Lebih jelasnya pertumbuhan ekonomi di Kota Probolinggo dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

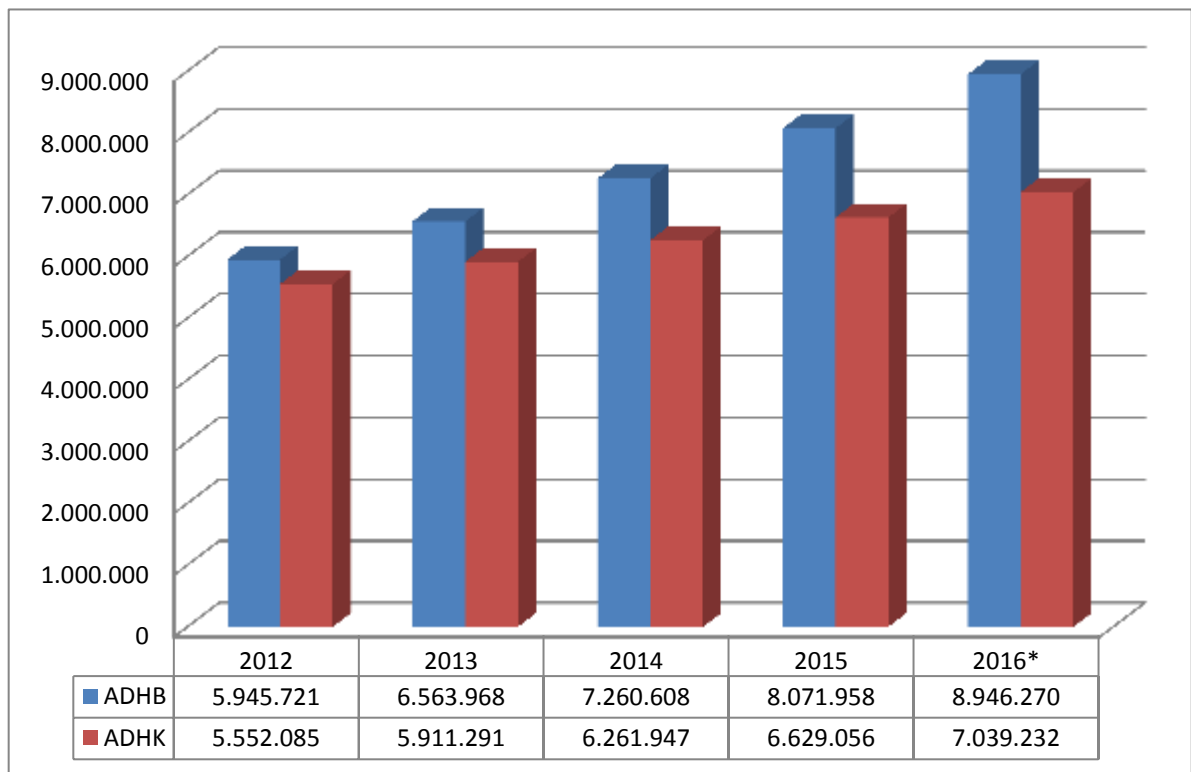
Gambar 3.1 Pertumbuhan Ekonomi Kota Probolinggo Tahun 2012-2016



Sumber : BPS Kota Probolinggo dan Dinas Kominfo Kota Probolinggo

PDRB Kota Probolinggo tumbuh dinamis seiring dengan pergerakan pembangunan. Dari tahun ke tahun PDRB Atas Dasar Harga mengalami peningkatan. Hal ini bisa dilihat dari tabel berikut :

Gambar 3.2 PDRB Kota Probolinggo Tahun 2012-2016



Sumber : BPS Kota Probolinggo dan Dinas Kominfo Kota Probolinggo

Sedangkan untuk mengetahui pertumbuhan riil dari setiap sektor terhadap PDRB Kota Probolinggo dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.1 PDRB Kota Probolinggo Tahun 2014–2016

No	Lapangan Usaha	ADHK			ADHB		
		2014	2015	2016*	2014	2015	2016*
1	2	3	4	5	6	7	8
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6.56	6.42	6.17	6.94	6.82	6.71
B	Pertambangan dan Pengalihan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C	Industri Pengolahan	16.74	16.68	16.59	15.75	15.72	15.48
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0.12	0.12	0.11	0.10	0.10	0.10
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur	0.25	0.24	0.23	0.24	0.22	0.21
F	Konstruksi	6.17	6.05	6.10	6.16	5.97	5.97
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	24.04	24.17	24.36	24.44	24.73	24.90
H	Transportasi dan Pergudangan	13.45	13.57	13.59	13.17	13.40	13.46
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3.16	3.25	3.33	3.47	3.66	3.85
J	Informasi dan Komunikasi	5.78	5.86	6.03	5.04	4.94	4.90
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	5.96	6.03	6.14	6.58	6.68	6.94
L	Real Estat	3.08	3.08	3.11	2.99	3.02	3.02
MN	Jasa Perusahaan	0.64	0.64	0.63	0.65	0.63	0.62
O	Administrasi Pemerintahan,	4.93	4.87	4.68	5.19	4.99	4.82

No	Lapangan Usaha	ADHK			ADHB		
		2014	2015	2016*	2014	2015	2016*
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib						
P	Jasa Pendidikan	4.71	4.69	4.68	4.97	4.86	4.88
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0.87	0.88	0.89	0.89	0.88	0.89
RSTU	Jasa Lainnya	3.56	3.46	3.35	3.43	3.37	3.24
	Produk Domestik Regional Bruto	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS Kota Probolinggo dan Dinas Kominfo Kota Probolinggo

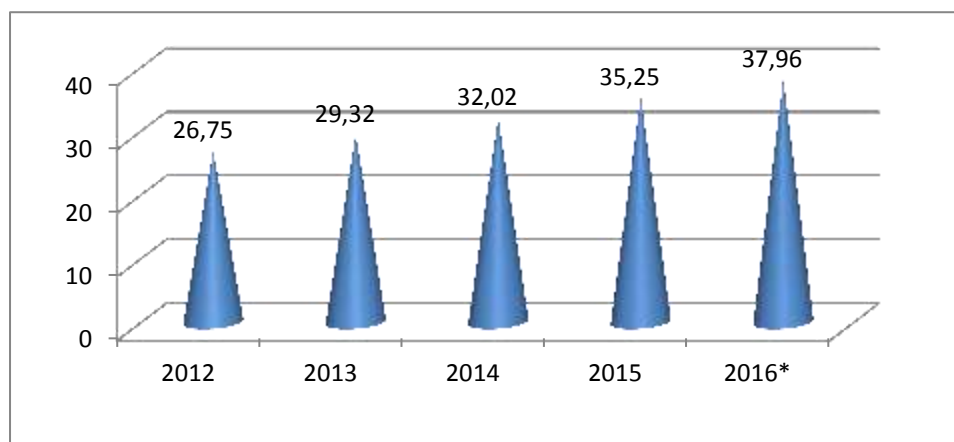
Dalam struktur perekonomian Kota Probolinggo, Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor merupakan penyumbang terbesar pertumbuhan ekonomi Kota Probolinggo yaitu sebesar 24,90%. Disusul berturut-turut dari sektor Industri Pengolahan (15,48%), sektor Transportasi dan Pergudangan (13,46%) dan sektor-sektor lainnya.

B. PDRB Perkapita

Salah satu indikator makro ekonomi yang digunakan untuk melihat tingkat kesejahteraan penduduk di suatu wilayah yang menggambarkan penerimaan penduduk secara nyata dan merata adalah PDRB Per Kapita. Pada tahun 2015, PDRB per kapita Kota Probolinggo mencapai 35,25 juta. Sedangkan pada tahun 2016, PDRB per kapita diestimasikan naik kembali sebesar 7,6 persen dari tahun sebelumnya.

PDRB Perkapita di Kota Probolinggo Atas dasar Harga Berlaku (HB) dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sejak tahun 2012-2016 dapat dilihat pada Gambar 3.3 dibawah ini.

Gambar 3.3 PDRB Per Kapita (Juta Rp) Tahun 2012-2016

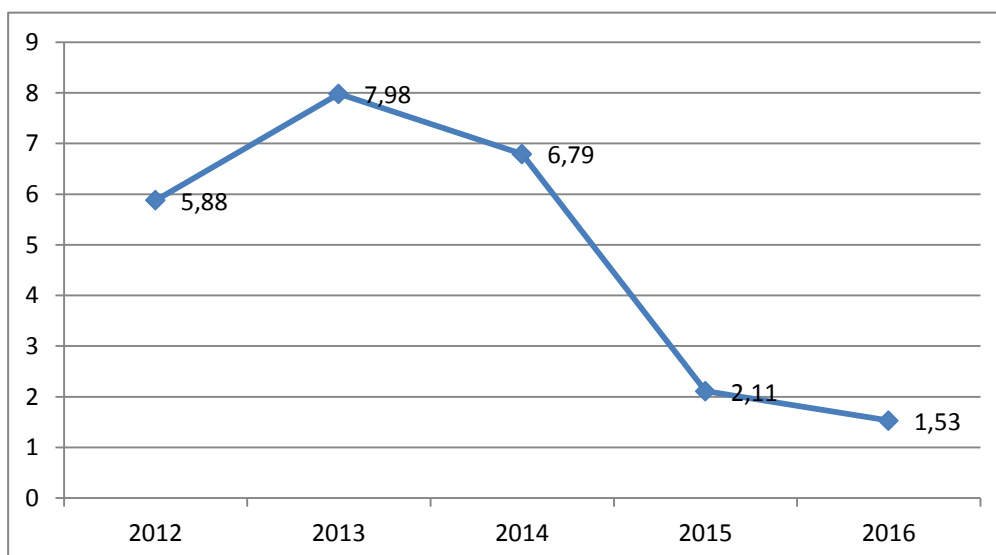


Sumber : BPS Kota Probolinggo dan Bappeda Litbang Kota Probolinggo

C. Inflasi

Salah satu analisis kinerja pembangunan ekonomi di suatu daerah adalah perubahan harga barang dan jasa (inflasi). Di Kota Probolinggo nilai inflasi secara berturut-turut pada tahun 2012, 2013, 2014, 2015 dan pada tahun 2016 mencapai 5,88%; 7,98%; 6,79%; 2,11% dan 1,53%. Adanya kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM), Tarif Dasar Listrik (TDL) yang mengakibatkan naiknya harga-harga secara umum sehingga memicu kenaikan inflasi. Grafik tingkat inflasi di Kota Probolinggo secara spesifik dapat dilihat pada Gambar 3.4.

Gambar 3.4 Laju Inflasi Kota Probolinggo Tahun 2012-2016



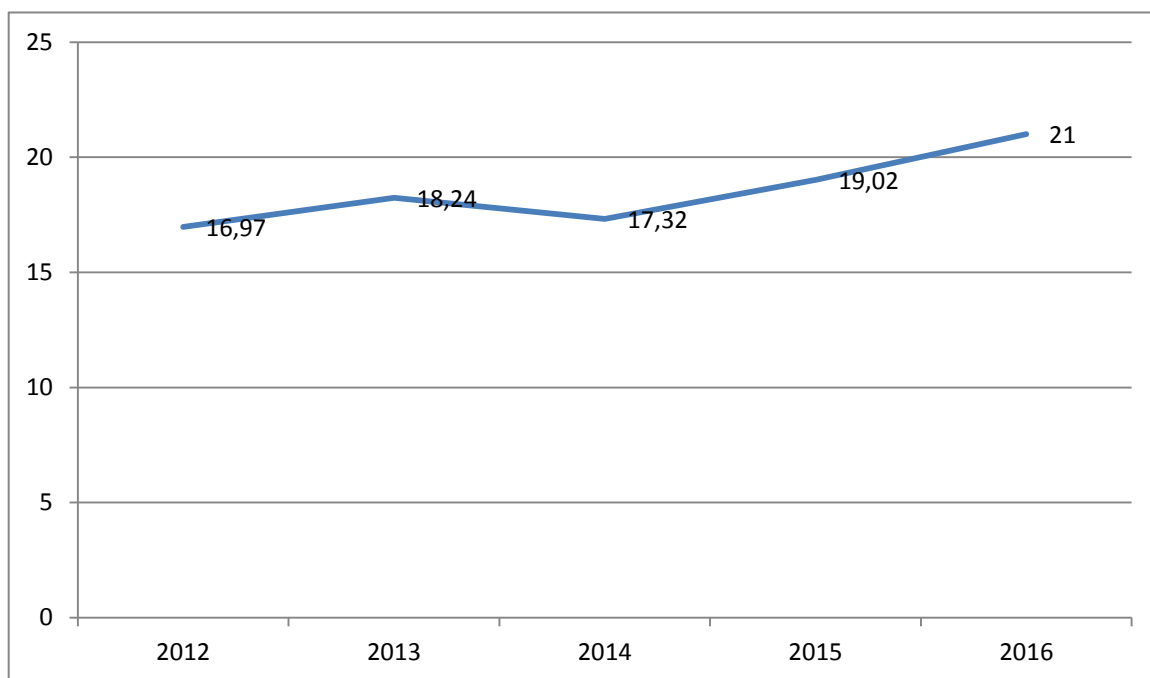
Sumber : BPS Kota Probolinggo

D. Ketenagakerjaan

Pertumbuhan ekonomi Kota Probolinggo yang diharapkan terus meningkat, memberikan peluang semakin luasnya kesempatan kerja bagi masyarakat sehingga mampu menyerap lebih banyak tenaga kerja dan menurunkan tingkat pengangguran

terbuka. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2016 tingkat pengangguran terbuka diestimasikan semakin menurun menjadi 3,59%. Namun diharapkan tingkat pengangguran terbuka akan semakin menurun pada tahun 2017. Laju Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Probolinggo secara spesifik dapat dilihat pada Gambar 3.5.

Gambar 3.5 Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Probolinggo Tahun 2012-2016



Sumber : Dinas Tenaga Kerja

E. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan penting dalam pembahasan pembangunan ekonomi. Berdasarkan data susenas BPS, prosentase dan jumlah penduduk miskin di Kota Probolinggo dari tahun 2011-2015 terus mengalami penurunan, namun tidak terlalu signifikan. Berikut jumlah penduduk miskin di Kota Probolinggo.

Tabel. Jumlah Penduduk Miskin

No	Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (000 jiwa)
1.	2011	38.8
2.	2012	24.3
3.	2013	19.2
4.	2014	19.03
5.	2015	18.66
6.	2016	n.a

Sumber : BPS Kota Probolinggo

Pada tahun 2014, BAPPEDA Kota Probolinggo melakukan verifikasi terhadap hasil PPLS Tahun 2011. Dari hasil verifikasi tersebut didapat usulan RTM baru. Berikut jumlah penduduk miskin berdasarkan hasil verifikasi Tahun 2013 - 2016.

**Tabel. Jumlah Penduduk dan RTM Miskin
(Berdasarkan PPLS 2011 dan validasi)**

NO	KELURAHAN	Updating 2014		Updating 2015		Desember 2016	
		RTM	Jiwa	RTM	Jiwa	RTM	Jiwa
1	Kec Kedopok	3.096	10.652	3.004	10.095	2.924	9.443
2	Kec Kademangan	3.989	14.470	3.638	12.771	3.488	11.364
3	Kec Kanigaran	4.696	18.470	4.468	16.967	4.408	13.288
4	Kec Wonoasih	3.897	14.240	3.693	13.341	3.639	12.829
5	Kec Mayangan	3.718	14.023	3.590	13.411	3.556	12.912
	TOTAL	19.396	71.855	18.350	66.453	18.015	59.836

Sumber : Bappeda Litbang Kota Probolinggo

Jika dilihat dari data diatas terdapat perbedaan antara data SUSENAS dan PPLS. Hal ini dikarenakan masing-masing data tersebut diperoleh dengan cara / metode yang berbeda untuk tujuan penggunaan yang juga berlainan satu sama lain.

Data SUSENAS termasuk dalam kelompok data makro yang diperoleh melalui pendekatan survei terhadap sampel. Pendekatan ini dimaksudkan untuk memperoleh suatu perkiraan tentang tingkat kemiskinan berdasarkan ukuran garis kemiskinan. Sedangkan Data PPLS masuk dalam kelompok data mikro yang diperoleh melalui pendekatan sensus. Pendekatan ini dimaksudkan untuk memperoleh data jumlah penduduk dengan pemeringkatan kesejahteraan dalam desil 1 sd 4. Data ini kemudian digunakan sebagai rujukan dalam penetapan sasaran karena dapat mengidentifikasi data nama kepala rumah tangga dan alamat tempat tinggal (by name by address).

3.1.2. Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2017 dan Tahun 2018

Perekonomian Kota Probolinggo dalam dua tahun mendatang dimungkinkan mengalami tantangan akibat dari pengaruh perdagangan bebas Asean (Masyarakat Ekonomia Asean / MEA) yang telah diberlakukan pada tahun 2015 lalu. Namun, hal tersebut akan diantisipasi dan dicarikan solusi terbaik sehingga pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah dapat terus berlangsung kearah yang lebih baik. Data Tabel di bawah ini menunjukkan perkembangan indikator makro ekonomi Kota Probolinggo tahun 2012 - 2016 beserta perkiraan tahun 2017 dan 2018.

**Tabel 3.2 Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kota Probolinggo Periode 2012-2016 dan
Perkiraan Tahun 2017-2018**

NO	INDIKATOR MAKRO	REALISASI					TARGET	
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi							
	Jumlah Penduduk	219.139	220.028	220.767	221.918	224.229	225.502	226.774
	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE/%)	6,49	6,47	5,93	5,86	6,19*	6	7
	Laju Inflasi (%)	5,88	7,98	6,79	2,11	1,53	4	4
	PDRB Perkapita (ADHB) (juta rupiah)	26,75	29,32	32,02	35,25	37,96*	13,34	14,17
2.	Kesejahteraan Sosial dan Pendidikan							
	Angka Melek Huruf(%)	93,35	95,75	96,93	95,73	95,04	97,13	97,83
	Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS / Tahun)	8,61	8,67	8,97	9,12	9,68	9,42	9,57
	Angka Partisipasi Murni (APM / Tahun)							
	• SD	101,08	101,20	101,90	101,98	99,87	102,02	102,04
	• SMP	91,37	95,56	97,58	98,98	95,44	99,02	99,04
	• SMU	101,87	95,96	95,54	98,08	98,25	98,12	98,14
	Angka Partisipasi Kasar (APK / Tahun)							
	• SD	110,13	109,93	110,78	111,14	109,05	110,53	110,73
	• SMP	116,63	118,32	120,45	124,11	122,57	119,31	119,64
	• SMU	126,19	126,90	127,91	123,63	125,58	129,03	129,74
3.	Kesehatan							
	Angka Usia Harapan Hidup (AHH)	69,46	69,50	69,52	69,72	69,79	70,80-71	70,80-71
	Angka Kematian Bayi (AKB / 1.000 KH)	10,95	19,14	24,58	23,37	26,64	24,74	23,87
	Jumlah Kematian Ibu (orang)	4	8	8	3	6		
4.	Ketenagakerjaan							
	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	16,97	18,24	17,32	19,02	21,00	15,8	15,5
5.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)							
		68,93	70,05	70,49	71,01	71,5	71,7	71,9

Sumber : Hasil Analisa

3.2. ARAH KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Keuangan daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan kesadaran untuk secara efektif memberikan perhatian kepada isu dan permasalahan strategis secara tepat. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan menghasilkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah. Keuangan daerah meliputi penerimaan atau pendapatan daerah, pengeluaran daerah atau belanja daerah dan pembiayaan daerah. Keuangan daerah dikelola dengan menganut azas tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Ditinjau dari sisi APBD, keuangan daerah dipergunakan untuk membiayai program/kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dari tahun ke tahun diperkirakan akan terus meningkat. Peningkatan ini menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pembangunan, baik secara fisik maupun non fisik.

3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran, yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah (penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah).

Untuk pendapatan daerah bersumber dari: 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari kelompok Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan lain-Lain Pendapatan Asli Daerah; 2) Dana Perimbangan terdiri dari Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus; 3) Kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah meliputi Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak dari Pemerintah Provinsi, dan Dana Bantuan Keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya. Selanjutnya untuk pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), Penerimaan Pinjaman Daerah, Dana Cadangan Daerah (DCD), dan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan. Selain dana dari penerimaan daerah tersebut, daerah menerima dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat berupa dana dekonsentrasi, dana tugas pembantuan dan urusan bersama, yang dialokasikan untuk menunjang program dan kegiatan pembangunan yang dilakukan berdasarkan prioritas dan bersifat penugasan kepada perangkat daerah.

Pendapatan asli daerah adalah semua penerimaan keuangan suatu daerah, dimana penerimaan keuangan itu bersumber dari potensi-potensi yang ada di daerah tersebut misalnya pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain, serta penerimaan keuangan tersebut diatur oleh peraturan daerah. Adapun sumber-sumber pendapatan asli antara lain :

1. Pendapatan asli daerah (PAD) yang terdiri dari :
 - a. Hasil pajak daerah yaitu Pungutan daerah menurut peraturan yang ditetapkan oleh daerah untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik. Pajak daerah sebagai pungutan yang dilakukan pemerintah daerah yang hasilnya digunakan untuk pengeluaran umum yang balas jasanya tidak langsung diberikan sedang pelaksanaannya bisa dapat dipaksakan.
 - b. Hasil retribusi daerah yaitu pungutan yang telah secara sah menjadi pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik pemerintah daerah bersangkutan. Retribusi daerah mempunyai sifat-sifat yaitu pelaksanaannya bersifat ekonomis, ada imbalan langsung walau harus memenuhi persyaratan-persyaratan formil dan materil, tetapi ada alternatif untuk mau tidak membayar, merupakan pungutan yang sifatnya budgetetairnya tidak menonjol, dalam hal-hal tertentu retribusi daerah adalah pengembalian biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi permintaan anggota masyarakat.
 - c. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Hasil perusahaan milik daerah merupakan pendapatan daerah dari keuntungan bersih perusahaan daerah yang berupa dana pembangunan daerah dan bagian untuk anggaran belanja daerah yang disetor ke kas daerah, baik perusahaan daerah yang dipisahkan, sesuai dengan motif pendirian dan pengelolaan, maka sifat perusahaan daerah adalah suatu kesatuan produksi yang bersifat menambah pendapatan daerah, memberi jasa, menyelenggarakan kemamfaatan umum, dan memperkembangkan perekonomian daerah.
 - d. Lain-lain pendapatan daerah yang sah ialah pendapatan-pendapatan yang tidak termasuk dalam jenis-jenis pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan dinas-dinas. Lain-lain usaha daerah yang sah mempunyai sifat yang membuka bagi pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan baik berupa materi dalam kegiatan tersebut bertujuan untuk menunjang, melapangkan, atau memantapkan suatu kebijakan daerah disuatu bidang tertentu.
2. Dana perimbangan diperoleh melalui bagian pendapatan daerah dari penerimaan pajak bumi dan bangunan baik dari pedesaan, perkotaan, pertambangan sumber daya alam dan serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Dana perimbangan terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus.

3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan daerah dari sumber lain misalnya sumbangan pihak ketiga kepada daerah yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah dibagi ke dalam tiga jenis, yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, dan Lain-lain Pendapatan yang sah. Pendapatan asli daerah merupakan porsi pendapatan yang secara hukum dan upaya diperoleh melalui usaha yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Melalui kreatifitas dan inovasi yang konstruktif dari pemerintah daerah, pendapatan asli daerah diharapkan dapat meningkat dari tahun ke tahun sesuai dengan kondisi dan potensi yang ada.

Ada 2 (dua) sumber pendapatan daerah di Kota Probolinggo yang memegang peranan penting dalam proses pengelolaan keuangan daerah; *Pertama*, sumber pendapatan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari Pemerintah Pusat yang di dalamnya terakomodasi Dana Dekonsentrasi dan Dana Pinjaman Luar Negeri. *Kedua*, sumber pendapatan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Probolinggo, yang pelaksanaannya ditetapkan melalui pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) dalam setiap tahunnya.

Dari semua pendapatan tersebut, yang memberikan kontribusi cukup besar berasal dari instansi yang lebih tinggi atau bantuan dari pemerintah pusat, sedangkan sumber pendapatan daerah yang berasal dari PAD masih terlalu kecil dibandingkan dengan bantuan dari Pemerintah Pusat. Hal ini menunjukkan bahwa, Kota Probolinggo selama ini dalam pembiayaan administrasi pemerintahan dan pembangunannya masih sangat tergantung dari pemerintah pusat, terutama untuk membiayai belanja pegawai berupa gaji. Dari kondisi tersebut maka pengelolaan pendapatan daerah harus dioptimalkan kinerjanya dalam meningkatkan penerimaan, khususnya yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna kelangsungan pendanaan penyelenggaraan pemerintahan dan Pembangunan Daerah di Kota Probolinggo.

Kinerja pendapatan daerah tahun 2016 yang terekam pada Tabel dibawah ini menunjukkan hasil yang cukup baik. Hasil ini diindikasikan dengan peningkatan pendapatan daerah dari target sebesar Rp. 834.622.437.448,00 dan direalisasikan sebesar Rp. 886.255.437.354,02. Sedangkan besarnya anggaran pendapatan daerah pada tahun 2017 adalah sebesar Rp. 843.315.751.663,66. Proyeksi pendapatan daerah tahun 2018 sesuai yang tercantum dalam RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2014-2019 adalah sebesar Rp.1.103.173.006.160,16.

**Tabel 3.3 Realisasi Penerimaan Daerah Tahun 2016 dan Anggaran Tahun 2017
serta Target Pagu Indikatif Penerimaan Daerah Tahun 2018**

NO	URAIAN	2016		2017	PROYEKSI 2018
		ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	
1	2	3	4	5	6
1	PENDAPATAN DAERAH	834.622.437.448,00	886.255.437.354,02	843.315.751.663,66	982.631.779.164,90
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	149.643.487.460,00	171.376.262.394,02	152.482.694.840,66	193.318.700.410,90
1.1.1	Pajak Daerah	27.015.900.000,00	31.076.858.870,05	27.372.700.000,00	30.223.025.834,00
1.1.2	Retribusi Daerah	13.013.669.599,00	12.831.539.509,00	12.490.772.399,00	12.508.771.899,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	997.495.861,00	997.533.281,00	1.649.439.641,66	1.608.706.157,90
1.1.4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	108.616.422.000,00	126.470.330.733,97	110.969.782.800,00	148.978.196.520,00
1.2	DANA PERIMBANGAN	588.329.713.974,00	613.830.831.039,00	640.026.412.000,00	737.417.622.909,00
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak	65.269.011.000,00	59.828.576.539,00	68.135.545.000,00	60.238.605.909,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	402.101.964.324,00	470.212.966.000,00	470.212.966.000,00	470.212.966.000,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	120.958.738.650,00	83.332.171.500,00	101.677.901.000,00	176.000.392.000,00
1.2.4	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	-	-	30.965.659.000,00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	96.649.236.014	101.048.253.921	50.806.644.823,00	51.895.455.845,00

NO	URAIAN	2016		2017	PROYEKSI 2018
		ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	
1	2	3	4	5	6
1.3.1	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	60.888.995.014,00	65.288.012.921,00	50.212.654.823,00	48.336.655.845,00
1.3.2	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	2.276.060.000,00	2.276.060.000,00	593.990.000,00	3.558.800.000,00
1.3.6	Pendapatan Lainnya	33.484.181.000,00	33.484.181.000,00	-	-

Sebagai upaya untuk mencapai target pendapatan daerah tahun 2018 yang diproyeksikan jauh lebih besar dari anggaran tahun 2017, sekaligus meningkatkan kemandirian keuangan daerah melalui peningkatan proporsi PAD terhadap total penerimaan daerah, maka akan dilakukan langkah-langkah berkaitan dengan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah serta pengelolaan BUMD yang efisien dan efektif sebagai berikut:

1. Peningkatan target pendapatan daerah baik Pajak Daerah maupun Retribusi Daerah secara terencana sesuai dengan kondisi perekonomian dengan memperhatikan kendala, potensi dan coverage ratio yang ada.
2. Mengembangkan kebijakan pendapatan daerah yang dapat diterima masyarakat, partisipatif, bertanggungjawab, dan berkelanjutan.
3. Perluasan sumber-sumber pendapatan daerah antara lain dengan mendayagunakan kekayaan atau aset-aset daerah yang ada dengan cara melakukan kerjasama dengan pihak ke tiga.

Pendapatan Daerah terdiri dari 3 (tiga) komponen utama yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pendapatan Asli Daerah merupakan cermin kemampuan dan potensi daerah, sehingga semakin tinggi kualitas otonomi daerah, maka ketergantungan (dependensi) dengan pemerintah pusat akan semakin berkurang. Sedangkan Dana Perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah

yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan dan penyelenggaraan Pemerintah Daerah utamanya untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang proporsional dan lebih baik.

Memperhatikan hal tersebut, maka dalam pelaksanaan APBD pada tahun anggaran berjalan dapat terjadi adanya perubahan proyeksi pendapatan daerah yang antara lain disebabkan karena perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang akan berakibat pada kemampuan masyarakat untuk melaksanakan kewajibannya membayar pajak dan retribusi daerah.

Sejalan dengan telah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menggali sumber-sumber pendapatan. Apalagi dengan telah diterbitkannya Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kota Probolinggo.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka kewenangan Pemerintah Kota Probolinggo untuk menggali sumber-sumber pendapatan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah menjadi sangat dimungkinkan. Untuk itu upaya-upaya Pemerintah Kota Probolinggo dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah dilaksanakan melalui rencana kerja sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik

Upaya peningkatan kualitas pelayanan diarahkan untuk semakin mendekatkan dan memudahkan masyarakat serta menyederhanakan sistem dan prosedur pelayanan yang diwujudkan dengan percepatan waktu pelayanan dan kepuasan kepada masyarakat.

2. Mewujudkan Sumberdaya Manusia (SDM) Aparat yang potensial, profesional serta membangun sistem kelembagaan yang berbasis kompetensi. SDM dalam pengertian ini mencakup kuantitas dan kualitas. Kedua aspek tersebut harus dikembangkan secara berimbang dan paralel. Beberapa kebijakan yang dilakukan adalah melalui diklat, pelatihan etika pelayanan, pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemungutan Pendapatan Asli Daerah.

3. Memanfaatkan sumber daya dan mensinergikan potensi daerah.

Dengan Program dan Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, peningkatan hubungan atau kerjasama antar SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo dan dengan Pemerintah Pusat yang dalam hal ini Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan yang ada di Kota Probolinggo dalam rangka peningkatan penerimaan bagi hasil PPh 21, 22, 23, dan PPN melalui sosialisasi secara intensif dan pemotongan secara langsung pajak-pajak dimaksud oleh petugas dari Kantor Pajak yang selalu siap di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset ketika SKPD mengajukan SPP dan SPM.

4. Mengoptimalkan koordinasi dengan pihak swasta.

Tidak dapat dipungkiri bahwa sektor swasta di Kota Probolinggo telah memberikan kontribusi yang cukup signifikan dalam Pendapatan Asli Daerah, mengingat kontribusi terhadap PDRB Kota Probolinggo untuk sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor menduduki ranking tertinggi yaitu sekitar 24,89%. Karena itu dalam rangka memaksimalkan pendapatan dari sektor ini diperlukan koordinasi dan sinergi yang baik antara pemerintah dan pihak swasta (pelaku usaha).

Terkait dengan Pendapatan Asli Daerah, langkah-langkah kebijakan yang diambil difokuskan pada 3 (tiga) bidang untuk meningkatkan penerimaan dari pos PAD baik pajak, retribusi, maupun penerimaan daerah bukan pajak.

a. Bidang Pendapatan

1. Perluasan dan peningkatan sumber penerimaan dan pembiayaan daerah serta mendorong peningkatan tertib administrasi keuangan daerah ;
2. Peningkatan hubungan kerja / kerja sama antar SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo dengan Pemerintah Pusat / Provinsi Jawa Timur dalam rangka peningkatan penerimaan Bagi Hasil dari pemerintah ;
3. Pengembangan fasilitas kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Probolinggo dan Propinsi Jawa Timur melalui pengelolaan parkir berlangganan ;
4. Optimalisasi pemanfaatan aset dan pengelolaan BUMD yang didukung oleh sistem evaluasi kinerja BUMD yang memungkinkan BUMD dioptimalkan maupun dilakukan restrukturisasi ;
5. Kerja sama dengan pihak ke tiga yaitu sektor swasta yang ada di Kota Probolinggo.

b. Bidang Pelayanan Publik

1. Pengembangan / peningkatan sarana dan prasarana pelayanan masyarakat ;
2. Pembangunan sarana dan prasarana pelayanan yang semakin dekat kepada masyarakat ;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan dengan memanfaatkan teknologi informasi (*hardware* dan *software*) sebagai pendukung utama kelembagaan ;
4. Pembangunan sistem dan prosedur daerah pemungutan dan pembayaran pajak, retribusi daerah dan komponen pendapatan daerah lainnya antara lain dengan melaksanakan deskresi pelayanan atau memangkas alur pelayanan menjadi lebih sederhana.

c. Bidang kelembagaan

1. Penyederhanaan peraturan perundang-undangan
2. Pengembangan manajemen pendapatan daerah melalui prinsip profesionalisme, efisiensi, transparan, akuntabel, dan bertanggungjawab.
3. Peningkatan kapabilitas dan profesionalisme Sumberdaya Manusia (SDM) Aparatur di bidang pengelolaan keuangan daerah.
4. On Job Training

5. Program rekrutmen Sumberdaya Manusia Aparatur berbasis kompetensi
6. Optimalisasi kinerja SKPD pemungut PAD

Sedangkan Dana Perimbangan, sebagaimana difokuskan pada:

- a) Memperjuangkan penerimaan pusat ke daerah seperti DAU, DAK, dan Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak secara proporsional sesuai dengan potensi dan kebutuhan Kota Probolinggo.
- b) Memperjuangkan kepada Pemerintah Pusat agar juklak dan juknis dana pembayaran khususnya DK dan Dana Bagi Hasil lebih fleksibel sesuai dengan kebutuhan daerah sehingga dana yang telah dialokasikan kepada Pemerintah Kota Probolinggo dapat terserap secara maksimal.

3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Pengelolaan belanja daerah dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan prestasi kerja (*performance-based budgeting*) yang berorientasi pada pencapaian dari output dan outcome yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran, serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD dalam rangka melaksanakan bidang kewenangan atau urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap SKPD harus terukur, yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Realisasi kinerja belanja, dalam format belanja langsung dan tidak langsung Kota Probolinggo Tahun 2016 dan 2017 diperinci pada Tabel dibawah ini.

Tabel 3.4 Realisasi Belanja Daerah Tahun 2016 dan Anggaran Tahun 2017 serta Target Pagu Indikatif Belanja Daerah Tahun 2018

NO	URAIAN	REALISASI ANGGARAN 2016	ANGGARAN 2017	PROYEKSI 2018
1	2	6	7	8
2	BELANJA DAERAH	911.768.784.364,92	917.789.184.668,13	1.048.760.947.104,16
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	404.061.412.510,75	436.752.136.826,30	352.574.003.218,16
2.1.1	Belanja Pegawai	378.293.526.303,75	388.972.866.103,41	312.298.712.012,16
2.1.2	Belanja Barang Dan Jasa	-	-	-

NO	URAIAN	REALISASI ANGGARAN 2016	ANGGARAN 2017	PROYEKSI 2018
1	2	6	7	8
2.1.3	Belanja Subsidi	33.060.000,00	56.880.000,00	-
2.1.4	Belanja Hibah	22.092.733.000,00	40.557.983.742,00	33.509.245.342,00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	1.298.850.000,00	2.800.000.000,00	3.014.000.000,00
2.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota Dan Pemerintahan Desa	-	-	-
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Daerah Dan Pemerintah Desa	575.955.036,00	752.045.864,00	752.045.864,00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	1.767.288.171,00	3.612.361.116,89	3.000.000.000,00
2.1.9	Dana Cadangan	-	-	-
2.2	Belanja Langsung	507.707.371.854,17	481.037.047.841,83	696.186.943.886,00
2.2.1	Belanja Pegawai	50.168.794.248,00	52.729.167.298,65	-
2.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	309.832.797.580,32	270.179.261.965,28	-
2.2.3	Belanja Modal	147.705.780.025,85	158.128.618.577,90	-
	Surplus / (Defisit)	(25.513.437.010,90)	(74.473.433.004,47)	(66.129.167.939,26)

Berdasarkan hasil analisis terhadap realisasi kinerja belanja pada tahun 2016 dan rencana 2017, serta dengan memperhatikan proyeksi tahun 2018 dan kemampuan pendapatan dan kebutuhan pendanaan untuk usulan program / kegiatan tahun 2018; maka disusun kebutuhan belanja tahun 2018. Sebagaimana telah diuraikan di muka dalam skenario pembangunan ekonomi Kota Probolinggo, bahwa untuk mencapai target LPE

sebesar 7% diperlukan tambahan pembentukan modal dan / atau investasi pada tahun 2018 dengan belanja langsung APBD. Penggunaan proyeksi belanja akan disesuaikan dengan prioritas pembangunan kota Probolinggo, yang masih terkait dengan bidang-bidang prioritas sebelumnya, antara lain: pendidikan, kesehatan, kemiskinan dan pengangguran, infrastruktur dan tata ruang, Reformasi Birokrasi, tatakelola dan pelayanan publik, Iklim Investasi ,industri dan UMKM, Lingkungan Hidup dan Bencana alam.

Secara spesifik, kebijakan belanja Kota Probolinggo dirumuskan sebagai berikut:

- a) Pengalokasian Belanja Daerah diarahkan pada program dan kegiatan pelayanan dasar kepada masyarakat yang mengacu pada prioritas pembangunan Kota Probolinggo.
- b) Kegiatan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Kota Probolinggo dan masyarakat serta mengacu pada prioritas pembangunan Kota Probolinggo dan penjabaran visi serta misi RPJMD tahun 2014-2019.
- c) Pendanaan kegiatan darurat yang penganggarnya belum tersedia atau belum mencukupi pada tahun berjalan.
- d) Mengakomodasi kebutuhan masyarakat berkembang dan tidak terkonsentrasi pada program dan/atau kegiatan serta lokasi tertentu.
- e) Penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan dalam tahun anggaran yang berjalan yang diperkirakan tidak dapat terealisasi secara optimal.

Oleh karena itu, kebijakan belanja daerah Tahun Anggaran 2018 difokuskan pada:

- a) Efektifitas dan efisiensi pemanfaatan belanja daerah melalui pemanfaatan belanja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta mengoptimalkan target kinerja sektor untuk mendukung target kinerja tahun 2018.
- b) Mempertajam alokasi anggaran melalui upaya pemberdayaan ekonomi rakyat dan mempercepat pembangunan infrastruktur yang menunjang perekonomian daerah dalam rangka mendukung percepatan target-target kinerja ekonomi tahun 2018.
- c) Penanganan isu-isu strategis melalui stimulasi belanja dan bekerjasama dengan lembaga-lambaga atau instansi yang berkompeten.
- d) Mengoptimalkan pemanfaatan belanja langsung untuk penyelenggaraan urusan Pemerintah Kota Probolinggo dan fasilitas bantuan keuangan, belanja bantuan hibah maupun belanja bantuan sosial sesuai kemampuan keuangan daerah dan mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.
- e) Memenuhi kekurangan dana sharing untuk percepatan pembangunan infrastruktur dan sektor usaha produktif serta program dan kegiatan lain yang telah menjadi kesepakatan bersama (MoU) antara Pemerintah Kota Probolinggo dengan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

- f) Pemenuhan belanja langsung untuk operasional kantor dengan prinsip efisiensi pemanfaatan air, listrik, telepon serta rehabilitasi ringan gedung kantor.

3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Sumber penerimaan daerah berasal dari: 1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu, 2) Transfer dari dana cadangan, 3) Penerimaan pinjaman dan obligasi, serta 4) Hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan. Adapun ragam pengeluaran dalam komponen pembiayaan anggaran daerah terdiri dari: 1) Pencairan ke dana cadangan, 2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan. Tabel dibawah ini memerinci realisasi dan proyeksi besaran masing-masing sumber penerimaan dan pengeluaran pembiayaan Kota Probolinggo tahun 2016 hingga 2018.

Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2016 dan Anggaran Tahun 2017 serta Target Pagu Indikatif Pembiayaan Daerah Tahun 2018

NO	URAIAN	REALISASI ANGGARAN 2016	ANGGARAN 2017	PROYEKSI 2018
1	2	3	4	5
3	PEMBIAYAAN DAERAH	294.537.753.322,55	79.973.433.004,47	66.129.167.939,26
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	297.037.753.322,55	74.473.433.004,47	66.129.167.939,26
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	297.037.753.322,55	74.473.433.004,47	-
	Sisa Belanja Pegawai BTL			55.629.167.939,26
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan Perda No 4 / 2016			10.500.000.000,00
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	2.500.000.000,00	5.500.000.000,00	-
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	2.500.000.000,00	5.500.000.000,00	-
3.3	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SiLPA)	269.024.316.311,65	0,00	0,00

Kebijakan Umum peningkatan sumber pembiayaan adalah dengan meningkatkan manajemen pembiayaan daerah yang mengarah pada akurasi, efisiensi, efektifitas dan profitabilitas. Sedangkan strategi yang diambil adalah sebagai berikut:

1. Apabila APBD surplus maka harus digunakan untuk pengeluaran daerah. Sedangkan pinjaman kepada Pemerintah Pusat /Daerah lain dan / atau pendanaan belanja diutamakan untuk membayar pokok utang, penyertaan modal (investasi) daerah, pemberian peningkatan jaminan sosial;
2. Apabila APBD Defisit, maka dapat dipenuhi melalui Apabila APBD defisit, maka ditutupi dari penerimaan: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (Silpa); Pencairan dana cadangan; Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; Penerimaan pinjaman daerah; Penerimaan kembali pemberian pinjaman; dan penerimaan piutang daerah;
3. Apabila Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tidak mencukupi untuk menutup defisit APBD, maka ditutup dengan dana pinjaman.

Dengan memperhatikan perkembangan kebijakan pembiayaan daerah yang ada, *trend* ke depan, serta kebutuhan pembangunan daerah, maka arah kebijakan pembiayaan Kota Probolinggo adalah sebagai berikut:

1. Menciptakan pembiayaan anggaran yang *less risky* dan relatif tidak mengganggu stabilitas maupun kesinambungan anggaran pusat maupun daerah ;
2. Skenario penanggulangan defisit, sebagai konsekuensi dari proyeksi kemampuan pendapatan yang lebih rendah daripada rencana kebutuhan belanja, akan dilakukan dengan opsi-opsi berikut:
 - a. Melakukan penajaman kembali kebutuhan belanja program/kegiatan pembangunan, dengan memperhatikan prioritas penanganan masalah dan pemanfaatan peluang;
 - b. Melakukan upaya-upaya intensifikasi maupun ekstensifikasi pendapatan; serta
 - c. Menyesuaikan kebutuhan *input* (sumber daya) program/kegiatan dengan *output* dan *outcome* yang diperoleh dari pelaksanaan kegiatan.

Sedangkan kebijakan pengelolaan pembiayaan daerah di Kota Probolinggo untuk tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah

Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah di Kota Probolinggo yaitu berusaha untuk meningkatkan realisasi SiLPA dari tahun ke tahun yang diakibatkan karena terjadinya efisiensi, efektivitas dalam pengelolaan belanja daerah. Secara khusus arah kebijakan Pembiayaan Daerah di Kota Probolinggo untuk 2018 yang masuk dalam kategori penerimaan pembiayaan adalah sebagai berikut:

- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) diasumsikan tetap setiap tahun, dan akan digunakan untuk menutup defisit anggaran yang terjadi.

- b. Pinjaman daerah merupakan salah satu alternatif sumber pembiayaan daerah, namun pelaksanaannya selektif dan merupakan pilihan terakhir bila sumber-sumber pembiayaan daerah lainnya sudah tidak mampu untuk menutup defisit anggaran.
- c. Terkait dengan penerimaan dari Pihak Ketiga, maka:
 - Penerimaan Pihak Ketiga ditiadakan menyesuaikan regulasi dalam Perda Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (P3KD).
 - Penerimaan dari Pihak Ketiga dilakukan melalui pengelolaan kas non anggaran dan dilaporkan pada Laporan Arus Kas.
- d. Secara bertahap dilakukan terobosan pembiayaan keuangan daerah, yaitu dengan mempertimbangkan adanya obligasi daerah, saham, SBI dengan mempertimbangkan kemampuan SDM pengelola dan regulasi pemerintah.
- e. Optimalisasi pemberdayaan aset daerah sebagai sumber pembiayaan daerah.

2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah di Kota Probolinggo tahun 2018 diarahkan untuk:

- a. Pencairan dana cadangan berdasarkan Perda no 4 tahun 2016;
- b. Pengembalian kepada Pihak Ketiga ditiadakan menyesuaikan regulasi dalam Perda Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (P3KD);
- c. Memfasilitasi dan mendorong peningkatan kerjasama dengan pihak swasta / masyarakat antara lain melalui kerangka regulasi yang dapat meningkatkan partisipasi masyarakat/swasta dalam mendanai program dan kegiatan pemerintah daerah melalui kerjasama yang saling menguntungkan (*publik private partnership*).